Menteri ATR dan Bupati Bogor Resmikan Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi

CILEUNGSI (IM)- Setelah meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan di wilayah timur Kabupaten Bogor, Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku akan meresmikan lagi Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor yang bertempat di Kecamatan Cigudeg.

Ade Yasin menuturkan bahwa Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi ini akan melayani urusan petanahan di tujuh kecamatan yaitu Cileungsi, Jonggol, Tanjungsari, Sukamakmur, Gunung Putri, Klapanunggal dan Cariu.

"Secara luas dan jumlah penduduk, maka setidaknya Kabupaten Bogor butuh dua Kantor Perwakilan Pertanahan yaitu satu di Kecamatan Cileungsi dan satu lagi di Kecamatan Cigudeg, Alhamdulillah hari ini Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Abdul Jalil berkenan meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan Cileungsi," tutur Ade kepada wartawan, Rabu, (17/2).

Wanita berusia 52 tahun mantan advokat ini menerangkan selain membuka Kantor Perwakilan Pertanahan, juga dibutuhkan inovasi untuk terus meningkatkan pelayana administrasi pertanahan. "Kita harus meningkatkan inovasi dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja demi mewujudkan keinginan masyarakat akan cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukurnya kepengurusan administrasi pertanahan. ," terangnya.

Di tempat yang sama, Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Abdul Jalil mengatakan bahwa melihat jumlah penduduk yang sekitar 6 juta jiwa sudah seperti tiga provinsi di luar Pulau Jawa.

"Dengan jumlah penduduk layaknya tiga provinsi di luar Jawa maka butuh langkah kerja yang inovatif dan menggunakan informasi teknologi, saya mendukung apabila Kantor ATR / BPN Kabupaten Bogor membuka kantor perwakilan pertanahan," kata Sofyan.

Mantan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan jajarannnya terus memperbaiki layanan administrasi pelayanan seperti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), digitalisasi sertifikat hak milik (SHM) tanah dan lainnya.

"Kami terus memperbaiki pelayanan administrasi pertanahan walaupun kami akui masih belum baik hingga seperti di Kabupaten Bogor masih ada kasus sengketa atau konflik kepemilikan tanah, dengan PTSL, digiltalisasi SHM tanah dan lainnya akan meminimalisir konflik kepemilikan tanah," tambahnya. ● **gio**

Pemkot Bogor Siap Tegakkan Disiplin Prokes Lebih Tegas

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor siap menegakkan disiplin bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Bogor dengan sanksi yang lebih tegas untuk menurunkan kasus positif Covid-19. Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Kota Bogor, Rabu (17/2) mengatakan bahwa penegakan disiplin bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Bogor selama ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 tahun 2020, yang di dalamnya mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor. "Aturan soal protokol kesehatan dan sanksinya akan diatur dalam Perda tentang Ketertiban Umum," katanya.

Menurut Bima Arya, dalam Perda tersebut mengatur banyak hal mengenai ketertiban umum, termasuk mengatur soal penerapan protokol kesehatan. "Pada Pengaturan protokol kesehatan ini ada sanksi yang lebih berat, termasuk sanksi pidana," katanya.

Bima melihat, warga Kota Bogor saat ini mulai kendur menerapkan protokol kesehatan, misalnya ada yang tidak memakai master atau tidak rajin mencuci tangan menggunakan air sabun.

"Saya melihat fenomena kendurnya disiplin warga ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor tapi di banyak daerah di Indonesia. Karena itu, menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk mengingatkannya, bahwa saat ini belum bebas Covid -19," katanya.

Bima menegaskan, untuk mengurangi kasus positif Covid -19, semua pihak harus berikhtiar mencegahnya, mulai dari sosialisasi, pencegahan, mengurangi mobilisasi warga, sampai penegakan hukum bagi pelanggarnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menambahkan, pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi, termasuk di Kota Bogor. Namun, landasan hukum untuk penegakan disiplinnya dinilai belum kuat, tapi ke depan Pemerintah Kota Bogor akan menguatkan landasan hukumnya.

Nantinya, setelah Perda Ketertiban Umum yang juga mengatur mengenai protokol kesehatan diberlakukan, kata dia, maka penegakan hukumnya bisa menjadi lebih tegas, di antaranya bisa dikenakan sanksi pidana. "sasarannya untuk menekan kasus positif Covid -19," katanya. ● **gio**

IDN/ANTARA

PEDAGANG PASAR BARU BANDUNG TERDAMPAK COVID-19

Sejumlah maneken terpajang di depan kios pakaian yang tutup di Pasar Baru Trade Center, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/2). Himpunan Pedagang Pasar Baru (HP2B) Kota Bandung mengatakan sedikitnya 60 persen dari lima ribuan pedagang yang biasa memasarkan busana muslim, oleh-oleh haji dan seragam sekolah di Pasar tersebut terpaksa menutup usahanya dan merugi akibat pandemi Covid-19.

Sekda Ungkap Penyebab Vaksinasi di Jabar Lamban

BEKASI (IM)- Proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Jawa Barat sampai saat ini belum juga rampung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan vaksinasi nakes bisa selesai pada akhir Februari ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, sekaligus Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, saat ini nakes yang sudah divaksin mencapai 192.000 orang. Jumlah itu masih 80 persen dari total jumlah nakes di Jabar.

"Hampir 80 persenan dari jumlah nakes (sudah divaksin). Kami targetkan akhir Februari selesai. Karena targetnya gini, mana kala nakesnya selesai maka kelompok berikutnya bisa dilakukan," kata Setiawan di Puskesmas Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/2).

Dia mengatakan, kendala vaksinasi di Jabar lantaran suplai vaksin yang memang harus menunggu. Selain itu, tingginya jumlah penduduk menjadi faktor lain yang menyebabkan lambannya vaksinasi di Jabar

"Suplai vaksinnya yang memang harus menunggu sebab wilayah Jawa Barat itu penduduknya 1/5 dari penduduk Indonesia jadi wilayah kita paling banyak membutuhkan, kemudian persoalan adanya pro kontra vaksinnya," terangnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jumlah orang yang divaksin bertambah setelah adanya pernyataan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin aman dan halal. "Setelah adanya pernyataan dari BPOM bahwa vaksin ini aman dan dari MUI bahwa vaksin ini halal, kami melihat juga kejaduan yang divaksin hanya sedikit sekali yang mengalami KIPI setelah divaksin," tutur dia. ● **pur**

IDN/ANTARA

PERESMIAN KANTOR PERWAKILAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil (kiri) memberikan sertifikat tanah secara simbolis kepada Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) saat meresmikan Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Bogor di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/2). Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tujuh kecamatan yaitu Cileungsi, Gunungputri, Klapanunggal, Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Sukamakmur.

Ade Yasin Luncurkan Program Sami Sade

Program Sami Sade untuk membangun proyek-proyek insfrastruktur, banyak ditunggu demi meningkatkan ekonomi masyarakat desa, karena dengan mulusnya jalan maka akses menuju objek pariwisata, sentra pertanian, sentra perekonomuan lainnya maka jalur distribusi pun tidak lagi menjadi hambatan, kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

CILEUNGSI (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin yang dilantik pada akhir bulan Desember Tahun 2018 lalu akhirnya meluncurkan program satu miliar satu desa (Sami Sade) di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi

Sami Sade ialah program bantuan keuangan untuk membangun proyek-proyek insfrastruktur atau meningkatkan integritasi dan koneksitivitas serta meningkatkan kualitas insfrastruktur.

Tahun 2021 ini Pemkab Bogor sudah menganggarkan Rp 311,8 miliar untuk membangun jalan ataupun jembatan di 349 desa, 38 kecamatan dan 532 titik.

"Program Sami Sade ini banyak ditunggu demi meningkatkan ekonomi masyarakat desa, karena dengan mulusnya jalan maka akses menuju objek pariwisata, sentra pertanian, sentra perekonomuan lainnya maka jalur distribusi pun tidak lagi menjadi hambatan," kata Ade Yasin kepada wartawan, Rabu, (17/2).

Ibu dua orang anak ini menambahkan bahwa anggaran, jumlah titik, jumlah desa dan jumlah kecamatan yang mendapatkan program Sami Sade pada tahun ini bisa saja bertambah.

"Saat ini kami sedang merefocusing anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat II, kalau ada sisa anggaran maka bisa saka kami menambah anggaran program Sami Sade ini," tambahnya.

Ade menuturkan agar program Sami Sade ini tepat sasaran oleh aparatur desa , maka pencairan, penggunaan dan laporannya baik atau harusnya diawasi oleh masyarakat, Camat, Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan.

"Karena program ini untuk masyarakat maka selaian Camat, Inspektorat, kepolisian dan kejaksaan maka masyarakat juga harus mengawasi. Tertangkapnya Kasi Pelayanan Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin oleh kepolisian harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang lagi di program Sami Sade," tutur Ade.

Politisi PPP ini mejelaskan Program Sami Sade selain meningkatkan insfrastruktur juga berfungsi untuk mengurangi angka pengangguran, memupuk kesetiakawanan maupun efek positif lainnya.

"Dengan adanya program Sami Sade, Pemkab Bogor mengharapkan menjadi stimulus kebangkitan ekonomi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaam Baru (AKB). Selain itu kita juga harus menggalakkan kembali semangat kesetiakawanan dan gotong royong yang saat ini mulai memudar," jelasnya. ● **gio**

Bagian Jalan Penghubung Cianjur- Bandung Terdampak Longsor

CIANJUR (IM)- Hujan deras yang turun sejak tengah malam hingga pagi menyebabkan tebing setinggi 80 meter yang sudah dipasangi jaring baja pengaman di Tanjakan Mala, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, longsor sehingga bagian jalan penghubung Cianjur dengan Bandung tertutup material longsoran.

"Tidak ada korban jiwa, namun akses lalu lintas terputus karena ketinggian material longsor mencapai empat meter berupa batu dan tanah," kata Kepala Kepolisian Sektor Naringgul, AKP Yayan Suharyana saat dihubungi Rabu (17/2).

"Saat longsor terjadi arus lalu lintas sepi, sehingga tidak ada korban jiwa atau kerugian material yang terjadi," kata dia menambahkan.

Kepolisian, menurut dia, sudah berkoordinasi dengan TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas terkait untuk membersihkan bagian jalan yang tertutup longsoran tanah dan bebatuan. Upaya pembersihan jalan dilakukan dengan bantuan warga sekitar.

"Menjelang siang arus kendaraan yang sempat mengular dari kedua arah sudah dapat melintas meski dengan cara bergantian," kata Yayan.

Sekretaris BPBD Cianjur, Irfan Sopyan mengatakan, BPBD mengirim petugas dan Relawan Tangguh Bencana (Retana) untuk membantu penanganan dampak tanah longsor di wilayah Naringgul.

"Hingga saat ini, satu unit alat berat dan dua dump truck masih bekerja menyingkirkan material longsor (yang menutupi bagian jalan) sepanjang 10 meter dengan ketinggian mencapai dua meter," katanya.

"Informasi dari petugas, menjelang siang jalan nasional Naringgul-Ciwidey, Bandung, sudah dapat dilalui satu arah secara bergantian," katanya menambahkan.

Dia mengimbau pengguna jalan berhati-hati saat melintas di jalur selatan Cianjur karena tebing di daerah itu rawan longsor saat hujan turun. ● **pur**

Darman Simanjuntak Siap Berikan Layanan Tercepat

BOGOR (IM)- Kepala Perwakilan ATR/BPN Bogor Timur, Darman Simanjuntak bertekad akan memberikan pelayanan tercepat dalam melayani proses pertanahan di wilayahnya.

Hal ini dikatakan Darman Simanjuntak saat menjawab pertanyaan atas terganggunya pelayanan peralihan dari BPN Kabupaten Bogor, yang sejak Februari Komperisasi Kantor Pertanahan (KKP) telah ditutup.

Akibatnya sejumlah pemohon wilayah Bogor Timur meliputi, Kecamatan Gunungputri, Jonggol, Cariu, Taman Sari, Cileungsi, Kalapanunggal, dan Tanjungsari sempat resah dan bingung setelah layanan ditutup oleh BPN Kabupaten Bogor.

"Secepat berkas di BPN Kabupaten Bogor, akan segera diselesaikan.bahkan kami sudah memproses 316 berkas permohonan. Percayalah KKP akan memberikan pelayan cepat," kata Darman Simanjuntak, optimistis di sela-sela usai peresmian.

Menyinggung tentang berkas di BPN Kabupaten Bogor, dia berjanji akan segera mengambil alih proses pemohon pertanahan setelah KKP telah ditutup.

"Segera akan kami ambil berkas pada proses peralihan Perwakilan BPN Bogor Timur, pada saat KKP ditutup oleh di BPN Kabupaten Bogor," ujarnya.

Namun demikian, dia meminta kepada warga Bogor Timur mempersilakan datang ke Kantor Perwakilan Bogor Timur di kecamatan lama Cileungsi.

"Silakan pemohon memproses pertanahan Bogor Timur, datang ke kantor kami akan dilayani," tukasnya meyakinkan wartawan.

Kepala BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Archanto saat hendak dimintai keterangan dengan terburu-buru menaiki mobil meski sempat berfoto dengan wartawan jajaran pimpinan BPN.

" Silakan ke Pak Darman Simanjuntak," tuturnya kepada wartawan yang hendak menemuinya.

Sementara, Menteri ATR/BPN RI DR, Sofyan Jalil meresmikan Kantor Perwakilan Bogor Timur, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (17/2).

Terbentuknya, perwakilan Kantor Pertanahan Bogor Timur diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan bidang pertanahan di Kabupaten Bogor.

Sebagaimana diperoleh keterangan resmi, bahwa sudah diajukan dua lokasi kantor Perwakilan BPN untuk Bogor Barat dan Bogor Timur, tetapi Bogor Timur yang sudah siap dan didahulukan, mengingat volume tingkat pelayanannya tinggi. ● **gio**

1.500 UNIT HUNTAP BAKAL DIBANGUN

Pemkab Bogor Butuh Intervensi Anggaran

SUKAJAYA (IM)- Pemkab Bogor akan menyiapkan lahan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg seluas 52 hektare untuk membangun 1.500 unit hunian tetap (Huntap) bagi para korban bencana alam di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Cigudeg pada awal Januari 2020 lalu. Kebutuhan tambahan 1.500 unit Huntap tersebut karena selama dua tahun yaitu 2020 dan 2021, baik Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru membangun 563 unit Huntap.

"Hari ini kami tidak hanya menyiapkan lahan seluas 52 hektare untuk dibangun 1.500 unit Huntap di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, tetapi juga bekerjasama dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor kami juga menyiapkan sertifikat hak milik lahan Huntapnya untuk dibagikan kepada para pengungsi," kata Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin kepada wartawan, Selasa (16/2).

Dia menambahkan, pembangunan Huntap untuk para pengungsi ini karena sebelumnya rumah mereka mengalami kerusakan akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

"Para pengungsi ini menjadi korban bencana alam karena sebelumnya tinggal di zona merah atau rawan bencana alam hingga demi keselamatannya harus direlokasi ke zona hijau atau aman dari bahaya bencana alam," tambahnya.

Diwawancarai terpisah, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Lestya Irmawati menuturkan saat ini di lahan seluas 32 hektare di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan Desa Urug, Kecamatan Sukajaya pemerintah sedang membangun 563 unit Huntap.

"Saat ini 205 unit Huntap sedang dibangun di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya dan 358 unit Huntap lainnya di Desa Sukaraksa dengan total luas lahan 32 hektare, rencananya pembangunan 563 unit Huntap akan selesai pada akhir 2021 ini," tutur Irma sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan pada tahun ini Pemkab Bogor juga menyiapkan anggaran untuk land clearing lahan di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg seluas 52 hektare. Sementara untuk pembiayaan pembangunan 1.500 unit Huntap masih diajukan ke Pemprov Jawa Barat, BNPB serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Untuk pembiayaan pembangunan 1.500 unit Huntap di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg yang perunitnya senilai Rp72 juta selain dari APBD tingkat II, juga dibutuhkan lagi intervensi anggaran dari Pemprov Jawa Barat, BNPB serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," lanjutnya.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al-Muharrom meminta Pemkab Bogor melakukan percepatan pembangunan lebih dari 2.000 unit Huntap di wilayah Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Sukajaya. "Kami minta Pemkab Bogor melakukan percepatan langkah mulai dari penyiapan lahan, legalitas, pembuatan DED hingga pembangunan ribuan unit Huntap ini, hal itu kondisi hunian sementara sudah banyak yang mengalami kerusakan seperti atap yang bocor atau dinding triplek yang mulai lapuk," pinta Aan. ● **gio**